

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (Rodoni, 2008: 14).

Sumitro (2002:5) menyatakan bahwa “Bank Islam menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam”. Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa praktek riba adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, bank syariah berusaha menerapkan system bagi hasil dan jual beli dalam kegiatan operasinya sesuai dengan prinsipnya yang tidak menggunakan system bunga.

Pada undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Th.1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa istishna)”

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu bentuk perbankan yang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya baik dalam kegiatan penghimpun dana maupun penyaluran dana berdasarkan pada prinsip syariah Islam.

2.2 Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Produk pendanaan

Produk- produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.

- a. Pendanaan dengan prinsip Wadi’ah (simpanan) adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan (termasuk bank) bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan dalam bentuk produk simpanan yaitu : Giro wadi’ah dan tabungan wadi’ah (Arikunto,1992:31).
- b. Pendanaan dengan prinsip Mudharabah (Bagi Hasil) adalah perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan bank sebagai *mudharib* (pengelola), dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai

perjanjian. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk bagi hasil yaitu: Tabungan Mudharabah, Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*) dan Deposito/Investasi khusus (Terikat dalam prinsip *mudharabah al-muqayyadah*).

2. Produk Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya (Rodoni, 2008:23-27) yaitu:

- a. Prinsip Jual Beli (Ba'i) dilaksanakan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda, yang mana tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dengan menjadi harta atas barang yang dijual.
 - 1) Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
 - 2) Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.
 - 3) Istishna, produk istishna menyerupai salam namun dalam istishna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapakali (termin) pembayaran.

b. Prinsip Sewa (Ijarah), Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat, pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan jual beli bedanya hanya pada objeknya bila jual beli objek transaksi adalah barang sedangkan ijarah objek transaksinya adalah jasa.

c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah), produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah:

1) Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan usaha tersebut.

2) Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan, bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

3. Produk Jasa Perbankan (Rodoni, 2008:37) yaitu:

a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing), jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilaksanakan pada waktu yang sama dimana bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

- b. *Ijarah* (Sewa), jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan dan jasa tatalaksana administrasi dokumen dimana bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.3 Bagi Hasil

Menurut kamus Bahasa Indonesia, bagi hasil diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menunjuk pada perolehan atau pendapatan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 300)

Menurut Ktut Silvanita bagi hasil adalah suatu perkongsian Antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang terjadi. (Ktut Silvanita : 2009;35)

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil Antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhim) di masing – masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari tiga system, yaitu:

- a. *Profit and Loss sharing* yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan bersih (profit) yang diperoleh oleh pengusaha setelah total pendapatan dikurangi biaya – biaya, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing – masing pihak.
- b. *Profit Sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- c. *Revenue Sharing* merupakan hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Dalam prakteknya metode profit and loss sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah, kemudian metode profit sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, sedangkan metode revenue sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dananya di bank syariah dengan skema tabungan mudharabah atau deposito mudharabah. (Abdul Ghofur :2007;138)

2.4 Metode Perhitungan Bagi Hasil

untuk perhitungan bagi hasil, bank melakukan perhitungan dengan saldo akhir bulan dan dengan saldo rata – rata harian.

a. Perhitungan dengan Saldo Akhir Bulan

Keseluruhan dana yang dikelola oleh bank akan dikelompokkan berdasarkan jenisnya, misalnya menjadi Giro, Tabungan, Deposito 1, 3, 6, dan 12 Bulan. Maka bank dapat menggunakan table berikut sebagai alat bantu.

Tabel 2.1
Metode Perhitungan Dengan Saldo Akhir Bulan

Jenis	Saldo Akhir Bulan	Bobot*	Saldo Tertimbang	Distribusi Pendapatan per jenis	Nisbah Nasabah	Bagian Pendapatan Nasabah	Rata (%) Pendapatan nasabah
	1	2	3	4	5	$6 = 4 \times 5$	$7 = \frac{6}{1 \times 12 \times 100\%}$
Giro							
Tabungan							
Dep. 1							
Dep. 2							
Dep. 3							
Dep. 12							
Total							

Sumber : Adiwarman Karim :2004;322-323

Catatan : * Bobot = $1 - (\text{GWM} + \text{Excess Reserve} + \text{Floating})$

** Dalam Bank Konvensional, saldo tertimbang dikenal dengan *loanable funds*

Kolom 1 adalah saldo akhir bulan masing – masing jenis dana. Namun tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyimpan minimum 5% dari dana ini di Bank Indonesia dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM), dan biasanya bank juga memperhitungkan adanya kelbihan cadangan yang disimpannya di atas kewajibannya yang 5% tersebut, juga memperhitungkan dana – dana yang ditarik – disetor oleh nasabah investor (*floating*). Ketiga komponen ini menjadi basis pengurang dalam perhitungan bobot di kolom 2.

Kolom 3 adalah saldo yang benar – benar dapat diinvestasikan oleh bank. Kolom 4 adalah pendistribusian pendapatan yang diperoleh oleh bank kedalam masing – masing jenis dana. Kolom 5 adalah nisbah nasabah investor. Dengan mengalikan kolom 4 dan kolom 5, maka didapat bagian pendapatan nasabah untuk masing – masing jenis dana. Untuk memudahkan bank untuk menghitung bagi hasil kepada tiap – tiap investor, maka bank menghitung pendapatan nasabah pada kolom 6 tersebut dalam bentuk persentase, yaitu pada kolom 7. (Adiwarman Karim:2004;322-323)

b. perhitungan dengan saldo Rata – rata Harian

bank dapat pula melakukan perhitungan berdasarkan saldo rata –rata harian berdasarkan table berikut.

Tabel 2.2
Metode Perhitungan Dengan Saldo Rata – Rata Harian

Jenis	Saldo Akhir Bulan	Bobot*	Saldo Tertimbang	Distribusi Pendapatan per jenis	Nisbah Nasabah	Bagian Pendapatan Nasabah	Rata (%) Pendapatan nasabah
	1	2	3	4	5	$6 = 4 \times 5$	$7 = \frac{6}{1 \times 12 \times 100\%}$
Giro							
Tabungan							
Dep. 1							
Dep. 2							
Dep. 3							
Dep. 12							
Total							

Sumber: Adiwarman Karim :2004;322-323

** Karena digunakan saldo rata – rata harian, maka nilai itulah menggambarkan saldo mengendap. Bobot dihitung hanya dengan GWM sebagai factor pengurang.

Kolom 1 adalah saldo rata – rata harian bulanan bersangkutan masing – masing jenis data. Namun tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyimpan minimum 5% dari dana ini di Bank Indonesia dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM). Karena perhitungannya telah menggunakan saldo rata – rata harian, nilai ini telah merefleksikan saldo yang mengendap di bank yang dapat digunakan oleh bank untuk melakukan investasi. Jadi hanya komponen GWM saja yang menjadi factor pengurang dalam perhitungan bobot di kolom 2. Kolom 3 adalah saldo yang benar – benar dapat diinvestasikan oleh bank. Kolom 4 adalah pendistribusian pendapatan yang diperoleh oleh bank ke dalam masing- masing jenis dana. Untuk memudahkan bank untuk menghitung pendapatan nasabah pada kolom 6 tersebut dalam persentase, yaitu pada kolom 7.

2.5 Dependency Ratio

Dalam *life cycle hypoyhesis* yang dikemukakan oleh Franco Modigliani dikemukakan bahwa struktur umur penduduk merupakan faktor penting yang menentukan perilaku konsumsi dan tabungan rumah tangga. Secara umum, pekerja cenderung menabung sementara pensiunan cenderung menggunakan tabungan untuk membiayai konsumsi.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia

diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni rasio ketergantungan muda dan 19 rasio ketergantungan tua. Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 – 64 tahun. Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung

penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Semakin tinggi angka *dependency ratio* menggambarkan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif karena harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non-produktif sehingga pendapatan yang ada lebih banyak digunakan untuk konsumsi daripada menabung dan mengakibatkan penurunan dalam pembentukan modal dan akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

2.6 Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Syariah

Bagi sebuah bank sebagai lembaga keuangan, dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa – apa artinya tidak dapat berfungsi sama sekali

Menurut Muchdarsyah Sinungan Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Dana yang dimiliki atau yang di kuasai bank tidaklah berasal dari milik bank sendiri, tapi juga ada dana pihak lain.dana yang dikuasai bank bersumber dari :

- a. Dana modal sendiri adalah dana yang bersumber dari modal bank sendiri atau berasal dari pemegang saham. Dana ini disebut Dana Pihak Pertama.
- b. Dana pinjaman dari pihak luar. Ini disebut dana pihak kedua.
- c. Dana dari masyarakat. Dana ini disebut dengan dana pihak ketiga

Dana dari pihak luar atau dana dari pihak ketiga adalah dana yang dimiliki bank secara tidak permanen. Dana tersebut yang sewaktu – waktu ditarik kembali.

Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari pemilik bank itu sendiri ditambah dengan cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank baru mencapai 7% dari total aktiva 8%.(Zainal arifin :2006;50)

Jadi dana pihak ketiga adalah sejumlah uang yang dimiliki bank dan berasal dari pihak luar yang menyimpan uangnya. Dengan kata lain uang yang dimiliki bukan milik bank sendiri tapi titipan dari pihak luar. Bank hanya sebagai lembaga yang menghimpun kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Dalam pandangan syariah uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanyalah alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis Bunga dimana “uang mengembang – biakan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. (Zainal arifin :2006;47)

Dalam konsep syariah juga tidak dikenal *money demand for speculation*. Hal ini dikarenakan spekulasi terhadap uang tidak diperbolehkan. Karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah SWT yang diamanahkan untuk dapat dipergunakan oleh manusia sebesar – sebesarnya bagi kepentingan bersama. Dalam pandangan islam, uang adalah *flow concept*, karena harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik bagi perekonomian. Sebaliknya, uang *idle* hanya akan memperkecil kesempatan masyarakat menikmati kemakmuran ekonomi.(M.Syafi’I Antonio:2001;185)

2.7 Jenis – jenis Dana Pihak Ketiga

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah menawarkan berbagai macam kemudahan dan jenis simpanan yang dapat dipilih oleh nasabah. Masyarakat dapat menyimpan uangnya dalam bentuk Giro, Tabungan, ataupun Deposito. (Adiwarman Karim :2001;107)

a. Simpanan Giro (Demand Deposit)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaan. Bagi bank jasa giro merupakan dana murah karena dana yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari Bunga simpanan lainnya.

Menurut Muchdarsyah giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan

b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau

kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan Bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam prakteknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.

c. Simpanan Deposito (Time Deposito)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penerikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam prakteknya jenis deposito terdiri dari Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan Deposito On Call.

Dalam melakukan praktek penggalangan dana dari masyarakat, bank syariah mempunyai prinsip tersendiri yang berbeda dengan prinsip yang digunakan bank konvensional. Prinsip tersebut adalah mudharabah dan wadi'ah.(Adiwarman Karim :2001;91)

2.8 Mudharabah

Secara etimologi kata Mudharabah berasal dari kata al-dharb fi al-ardhi yaitu usaha dalam perniagaan. Mudharabah disebut juga dengan qiradh yang berasal dari qardhu dengan makna qath'u (potongan), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Mudharabah disebut juga dengan mu'amalah. Pengertian

Mudharabah ialah antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. (Sayyid sabiq :2008;217).

Madzab Syafi'I mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

Menurut Adiwarman Karim, Mudharabah adalah salah satu bentuk produk perbankan syariah yang terdiri dari kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah uang kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian keuntungan.

Menurut M. Nejatullah Siddiqi, Mudharabah berarti bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan – tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan.

Secara umum mudharabah terbagi dua jenis :

1) Mudharabah Mutlaqah

Dalam Mudharabah Mutlaqah tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, kebisnis apa dan yang disimpannya itu hendak disalurkan atau penetapan penggunaan akad – akad tertentu ataupun mensyaratkan danannya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh. Dari penerapan system

Mudharabah mutlaqah di atas dikembangkan deposito Mudharabah dan tabungan Mudharabah.

2) Mudharabah Muqayyadah

Dalam Mudharabah muqayyadah ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah memberikan persyaratan kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau penetapan penggunaan akad – akad tertentu. Mudharabah muqayyadah ada dua jenis yaitu :

a) Mudharabah muqayyadah on balance sheet

Jenis ini merupakan simpanan khusus karena pemilik dana dapat menetapkan syarat – syarat tertentu yang harus dipatuhi bank.

b) Mudharabah muqayyadah of balance sheet

Jenis ini merupakan penyaluran dana mudharabah kepada pelaksana usahanya. Bank bertindak sebagai pelantara yang mempertemukan Antara pemilik dengan pelaksana usaha.

3) Mudharabah musytarakah

Adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. (Dwi Suwiknyo : 2010 ; 77)

Landasan Hukum Mudharabah adalah sebagai berikut

Akad mudharabah memiliki landasan hukum dalam al – Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Sungguhny Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi

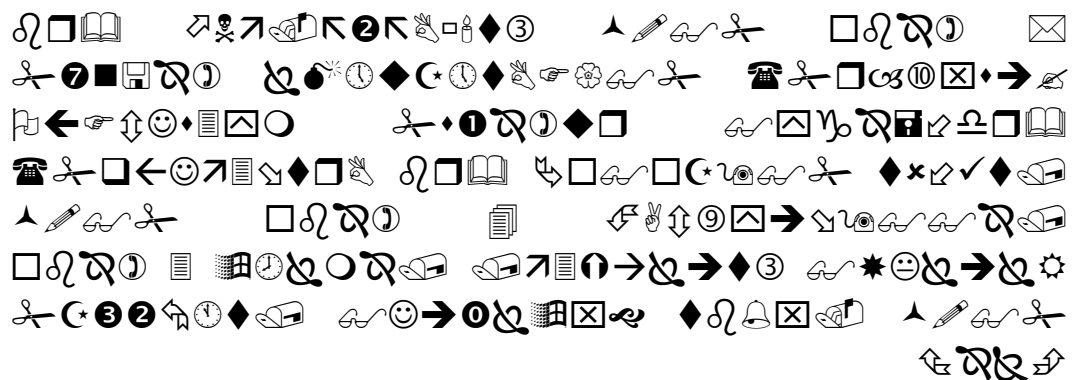
Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Muzammil 73:20)

2.9 Wadi'ah

Wadi'ah adalah suatu kontrak perjanjian Antara pemilik asset dan custodian (bank) untuk melindungi asset/capital dari kerusakan atau kehilangan serta menjaga keamanan asset.

Landasan hukum wadi'ah adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT



Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisaa 4:58)

2.10 Review Studi Terdahulu

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No.	Nama (tahun)	Judul	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Yuliana (2009)	Faktor – faktor yang mempengaruhi dana pihak ketiga pada perbankan syariah tahun 2006-2008	Bagi hasil, Inflasi, PDB (produk domestic bruto) dan Return on investmen	Terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji pengaruh terhadap dana pihak ketiga	Dari segi judul penelitian, variabel dan lokasi penelitian
2	Hermanto (2008)	Faktor-faktor yang mempengaruhi dana pihak ketiga (DPK) bank umum syariah tahun 2005-2007	Suku bunga, jumlah bagi hasil, pendapatan nasional dan inflasi	Terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji pengaruh terhadap dana pihak ketiga	Dari segi judul penelitian, variabel dan lokasi penelitian
3	Septi Wulandari (2011)	Analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi total dana pihak ketiga (DPK) pada bank umum syariah Indonesia (Studi pada bank umum syariah perioden 2011-2013)	Bagi hasil, Inflasi, Pendapatan Nasional, Jumlah kantor layanan	Terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji pengaruh terhadap dana pihak ketiga	Dari segi judul penelitian, variabel dan lokasi penelitian
4	Rahmatika (2010)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum di Sulawesi Selatan	PDRB Perkapita Rill, Suku Bunga Rill, Kurs Rill, dan Dependency Ratio	Terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji pengaruh terhadap dana pihak ketiga	Dari segi judul penelitian, variabel dan lokasi penelitian

Sumber: Data diolah

2.11 Kerangka Penelitian

Berdasarkan konsep-konsep dasar teori yang dijelaskan di atas, peneliti menggambarkan hubungan antara bagi hasil dan dependency ratio terhadap dana pihak ketiga ke dalam kerangka penelitian:

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

